

Perkembangan Pengelolaan Inovasi Daerah: Bidang Penelitian dan Pengembangan Pemerintah Kota Bekasi Tahun 2017-2022

Development of Regional Innovation Management: Research and Development Division of the Bekasi City Government in 2017-2022

Novie Panda Citra, Agus Heruanto Hadna, Achmad Djunaedi

Universitas Gadjah Mada, Bulaksumur, Yogyakarta

E-mail: novie.panda.citra@mail.ugm.ac.id

Naskah diterima tanggal 19 Maret 2024. Naskah direvisi tanggal 10 Juni 2024.

Naskah disetujui tanggal 11 Juni 2024.

Abstrak

Pertumbuhan dan perkembangan sebuah daerah tidak dapat dipisahkan dari pentingnya penerapan inovasi daerah. Inovasi tidak hanya menjadi tren di lingkup pemerintah pusat, namun inovasi juga perlu dikembangkan di lingkup pemerintah daerah dikarenakan pembangunan negara bermuara ke daerah. Inovasi menjadi suatu alat yang mumpuni dalam meningkatkan daya saing daerah, mempercepat pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pengelolaan inovasi Kota Bekasi dimulai sejak tahun 2017. Sesuai dengan perundangan, pengelolaan inovasi daerah menjadi tanggung jawab Bidang Litbang selaku pembina inovasi dalam penyelenggaraan inovasi daerah. Penelitian dilakukan menggunakan metode kualitatif dengan metode studi kasus abduktif. Penelitian ini bertujuan untuk mengamati proses perkembangan pengelolaan Inovasi daerah yang dilakukan oleh Bidang Litbang Pemerintah Kota Bekasi. Periode amatan mulai dari inovasi daerah diimplementasikan di Kota Bekasi yaitu tahun 2017 hingga tahun 2022. Analisa data menggunakan analisis penjadohan pola, pembuatan eksplanasi dan analisis deret waktu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat tiga periode perkembangan pengelolaan inovasi selama kurun waktu enam tahun. Periode ke 1 Tahun 2017 merupakan periode awal terbentuknya Balitbang. Tahun 2017 Balitbang masih berfokus pada penguatan kelembagaan secara internal serta proses pendataan dan pelaporan inovasi masih manual. Periode ke 2 Tahun 2018-2019 merupakan periode implementasi rangkaian program dan kegiatan inovasi dalam rangka penguatan inovasi daerah bagi organisasi perangkat daerah untuk meningkatkan kemampuan dan keahlian di bidang inovasi. Periode ke 3 Tahun 2020-2022 merupakan periode penggabungan kelembagaan Balitbang dan Bapeda menjadi Bappelitbangda. Pendataan dan pelaporan inovasi sudah menggunakan TIK. Rangkaian tahapan perkembangan pengelolaan inovasi daerah yang dilakukan adalah eksplorasi ide dan gagasan, replikasi inovasi, inkubasi inovasi, diseminasi inovasi dan aktualisasi inovasi.

Kata kunci: Inovasi Pemerintah Daerah; Pemerintah Daerah; Kota Bekasi

Abstract

The growth and development of a region cannot be separated from the importance of implementing regional innovation. Innovation is not only a trend in the central government, but innovation also needs to be developed in the regional government because national development flows to the regions. Innovation is a powerful tool in increasing regional competitiveness, accelerating economic growth and improving community welfare. The management of Bekasi City innovation began in 2017. In accordance with the legislation, the management of regional innovation is the responsibility of the Research and Development Division as the innovation supervisor in organizing regional innovation. The research was conducted using a qualitative method with an abductive case study method. This study aims to observe the process of development of regional innovation management carried out by the Research and Development Division of the Bekasi City Government. The observation period starting from the implementation of regional innovation in Bekasi City was from 2017 to 2022. Data analysis used pattern matching analysis, explanation creation and time series analysis. The results of the study showed that there were three periods of innovation management development over a period of six years. Period 1 in 2017 was the initial period of the formation of Balitbang. In 2017, Balitbang still focused on strengthening institutions internally and the process of data collection and reporting of innovation was still manual. Period 2 of 2018-2019 was the period of implementing a series of innovation programs and activities in order to strengthen regional innovation for regional apparatus organizations to improve their capabilities and expertise in the field of innovation. Period 3 of 2020-2022 was the period of merging the institutions of Balitbang and Bapeda into Bappelitbangda. Data collection and reporting of innovation already use ICT. The series of stages of development of regional innovation management carried out are exploration of ideas and concepts, replication of innovation, incubation of innovation, dissemination of innovation and actualization of innovation.

Keywords: *Local Government Innovation; Local Government; Bekasi City*

PENDAHULUAN

Pertumbuhan dan perkembangan suatu daerah serta meningkatnya daya saing daerah tidak dapat dipisahkan dari pentingnya penerapan inovasi daerah (Suparno, 2017). Inovasi tidak hanya menjadi trend di lingkup pemerintah pusat, namun inovasi juga perlu dikembangkan di lingkup pemerintah daerah dikarenakan pembangunan suatu negara bermuara ke daerah (Tedjo, 2017). Pembangunan suatu negara sangat tergantung pada perkembangan dan kebaruan daerah sehingga inovasi menjadi sangat penting untuk menggali sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan nilai tambah pembangunan daerah. Inovasi menjadi suatu alat yang mumpuni dalam meningkatkan daya saing, mempercepat pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (Matridi dkk., 2021).

Menurut [Cornell University dkk., \(2020\)](#) kondisi inovasi pemerintah Indonesia tahun 2020 berada di posisi ke-85 dunia dan dua terbawah di tingkat Asia (gambar 1). Fakta ini menjelaskan bahwa baru sebagian kecil pemerintah daerah yang melakukan inovasi daerah di Indonesia. Hal ini menjadi bagian dari tantangan serta peluang pemerintah daerah untuk menciptakan lingkungan yang inovatif serta situasi yang kondusif melalui pengembangan dan pengelolaan inovasi di tingkat daerah sehingga pemerintah daerah dapat saling memotivasi dan meningkatkan inovasi daerahnya serta memperbaiki kualitas hidup masyarakatnya ([Stroeva dkk., 2014](#)).

<i>Country</i>	<i>Rank Global</i>	<i>Rank Region</i>
Singapore	8	1
Malaysia	35	8
Viet Nam	42	9
Thailand	43	10
Philippines	54	12
Brunei Darussalam	71	13
Indonesia	85	14
Cambodia	98	15
Total	129	15

Sumber : Cornell University dkk (2020)

Gambar 1. Perbandingan Indeks Inovasi Indonesia ditingkat Dunia dan Asia

Inovasi menjadi suatu kewajiban yang harus dilakukan agar keberadaan pemerintah dapat lebih berarti di mata masyarakat, karena inovasi tidak saja penting untuk meningkatkan layanan namun juga untuk meningkatkan kapabilitas pemerintah ([Tahir dan Harakan, 2017](#)). Dinamika perubahan kebijakan pada pemerintah pusat telah memberi dampak dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan dikeluarkannya perundangan No 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, sebagai upaya menghadapi perubahan tersebut dibutuhkan suatu kebijakan yang tepat sasaran, demi mendongkrak daya saing daerah, di samping itu adanya penguatan kelembagaan turut memberikan peran yang penting bagi daerah ([Mohamad Zaenal Arifin dan Arif Barata Sakti, 2017](#)).

Sejalan dengan agenda Nawa Cita pemerintahan Presiden Joko Widodo, penerapan inovasi di pemerintahan mendapat perhatian yang begitu serius. Dalam berbagai kesempatan, Presiden Joko Widodo sering menekankan aparatur di semua level untuk melakukan terobosan dalam upaya perbaikan kualitas layanan publik secara lebih signifikan ([Abnur, 2017](#)). Baregheh dkk., (2009) mengungkapkan inovasi diakui memainkan peran

sentral dalam menciptakan nilai dan mempertahankan keunggulan kompetitif maka organisasi harus berinovasi dan mempromosikan inovasinya.

Seiring perkembangan inovasi yang sedang tumbuh di pemerintah daerah, maka diterbitkan Undang-Undang No 38 Tahun 2017 tentang inovasi daerah, adanya peraturan perundangan ini semakin menguatkan dukungan pemerintah untuk mendorong terciptanya inovasi pada pemerintah daerah. Pemerintah Kota Bekasi merupakan pemerintah daerah yang berkomitmen dalam pelaksanaan dan pengelolaan inovasi. Ini tercermin dalam visi Pemerintah Kota Bekasi yaitu cerdas, kreatif, maju, sejahtera dan ihsan serta menjadi sebuah bagian komitmen dari misi ke-4 Kota Bekasi dalam upaya meningkatkan dan mengembangkan kualitas kehidupan masyarakat yang berakal sehat, berakhlak, kreatif dan inovatif yang juga tercantum dalam RPJMN Kota Bekasi Tahun 2018-2023.

Selain adanya kerangka regulasi dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang berpihak kepada inovasi, program-program Kementerian/Lembaga yang semakin mempromosikan inovasi melalui ajang kompetisi turut serta menjadi bagian untuk memotivasi pengembangan inovasi daerah, seperti keikutsertaan Pemerintah Kota Bekasi pada kompetisi tahun 2018 yaitu di ajang penghargaan Indonesia Smart Nation ke-3 Kota Bekasi mendapat predikat sebagai kota paling siap dalam menerapkan inisiatif kota inovatif dan pada tahun 2022 Kota Bekasi meraih penghargaan kembali dengan predikat peringkat ke-4 dengan kota terinovatif Se-Indonesia dalam ajang *Innovative Government Award*. Dengan adanya penghargaan tersebut, tentunya akan mendorong budaya kerja inovatif yang permanen dan berkelanjutan ([Nasution dkk., 2021](#)).

Adapun konsep pengelolaan inovasi daerah telah menjadi sebuah kebutuhan bagi instansi perangkat daerah yang memiliki tugas dan tanggung jawab dalam membina inovasi daerah. Ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 pasal 216 bahwa Badan Litbang Daerah menjadi perangkat daerah yang mempunyai kemampuan serta kapasitas dalam pengelolaan inovasi daerah. Inovasi daerah sebagaimana dimaksud dalam perundang-undangan diartikan sebagai semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Melalui inovasi daerah, Bidang Litbang Pemerintah Kota Bekasi melakukan penyelenggaraan inovasi yang dirintis sejak tahun 2017 dan hingga saat ini mengalami perkembangan yang pesat.

Hadirnya inovasi Pemerintah Kota Bekasi salah satunya di latar belakang oleh jumlah penduduk yang makin meningkat. Kota Bekasi menjadi salah satu kota dengan penduduk terbesar di Provinsi Jawa Barat yakni 2.470.972 jiwa, dengan luas wilayah sekitar

21.049 ha menjadi sebuah bentuk kepadatan penduduk yang dianggap luar biasa ([BPS, 2020](#)). Letak geografis Kota Bekasi yang bersebelahan dengan DKI Jakarta menjadikan Bekasi sebagai penyangga Ibu Kota serta termasuk salah satu kawasan industri terbesar di Indonesia sehingga banyak pendatang bermukim di Kota Bekasi, yang menyebabkan tingkat migrasi dan heterogenitas penduduk Kota Bekasi tinggi ([Yufriawati, 2006](#)). Urgensi akan kehadiran inovasi ini pula yang dibutuhkan kota Bekasi dalam menghadapi fenomena yang terjadi dewasa ini.

Selaras dengan yang diutarakan oleh Plt. Wali Kota Bekasi pada ajang penghargaan *Innovative Government Award* Tahun 2022 pada kanal *Youtube* BSKDN Kemendagri tanggal 22 November 2022, diungkapkan bahwa fenomena yang terjadi saat ini adalah warga Kota Bekasi merupakan warga yang peka akan kebutuhan dan hak akan pelayanan. Banyak warga Kota Bekasi yang memiliki pekerjaan di DKI Jakarta dan menuntut layanan yang sama seperti di DKI Jakarta. Adanya kondisi ini, memicu pemerintah Kota Bekasi untuk meningkatkan layanan publik yang berkualitas melalui penciptaan dan pengelolaan inovasi yang maksimal.

Dalam peraturan tentang inovasi daerah No 38 Tahun 2017 dijelaskan adanya inovasi daerah ditujukan untuk meningkatkan kinerja pemerintah daerah serta dalam rangka mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Regulasi tersebut dipertegas dengan munculnya Instruksi Wali Kota Bekasi No: 067/511/Bappelitbangda Litbang tentang Gerakan *One Agency One Innovation* bahwa setiap instansi harus memiliki minimal satu inovasi setiap tahunnya. Perkembangan inovasi Pemerintah Kota Bekasi dari kurun waktu tahun 2017 hingga tahun 2022, telah melahirkan 218 inovasi yang terdapat dalam aplikasi Sidik Jari, selanjutnya oleh Bidang Litbang Pemerintah Kota Bekasi secara administratif dan normatif ditinjau kembali didasarkan pengelolaan inovasi dengan cara-cara baru maka disaring menjadi 99 inovasi unggulan Kota Bekasi dalam rangka mengikuti ajang *Innovative Government Award* Tahun 2022, yang diharapkan mampu memberikan suatu Reformasi Birokrasi, perubahan perilaku dan *mindset* yang dimulai dari aparatur.



Sumber: Bidang Litbang Kota Bekasi (22/11/2022)

Gambar 2. 99 Inovasi Unggulan Kota Bekasi

Penerapan inovasi dilakukan dalam rangka memberi dampak positif bagi peningkatan dan kemajuan daerah. Setiap daerah berlomba-lomba untuk meningkatkan daya saing agar dapat mengembangkan dan memajukan daerahnya. Walaupun perkembangan inovasi di Indonesia secara kuantitas meningkat, namun inovasi yang diciptakan dan dihasilkan daerah masih dilakukan relatif parsial, *piecemeal* dan stagnan (Sururi, 2017). Parsial diartikan bahwa inovasi yang dilaksanakan tidak secara otomatis bisa dikoneksikan dengan inovasi lainnya. Sedangkan *piecemeal* (satu per satu) inovasi diindikasikan kurang memberikan dampak besar dan kolektif sehingga inovasi cenderung berjalan di tempat alias stagnan (Raja Abumanshur Matridi dkk., 2021).

Implementasi pengelolaan inovasi memang tidak mudah, jika diterapkan di suatu wilayah. Menurut Utomo (2017) rangkaian tahapan perkembangan pengelolaan inovasi daerah meliputi eksplorasi ide dan gagasan, inkubasi inovasi, diseminasi inovasi, replikasi inovasi dan aktualisasi inovasi. Dalam menerapkan inovasi tidak terlepas dari sumber daya organisasi, tempat/wilayah dan teknologi informasi komunikasi, sementara dalam tahapan pengembangan implementasi adanya kerjasama dan koordinasi sangat dibutuhkan (Annisah, 2017). Tujuan penelitian ini adalah Mendeskripsikan perkembangan pengelolaan inovasi daerah yang dilakukan oleh Bidang Litbang Pemerintah Kota Bekasi tahun 2017 – 2022.

Berdasarkan identifikasi faktor-faktor tersebut, menarik untuk mengkaji bagaimana perkembangan pengelolaan inovasi daerah dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi dalam perkembangan pengelolaan inovasi daerah yang dilakukan oleh Bidang Litbang Pemerintah Kota Bekasi mulai tahun 2017 hingga tahun 2022, dimana telah mengalami

beberapa perpindahan periodisasi. Pengkajian terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan pengelolaan inovasi daerah, diharapkan akan membantu dan memudahkan pemerintah dalam memantau dan mengevaluasi inovasi daerah agar dapat melakukan perbaikan dan peningkatan di segala aspek layanan baik internal maupun eksternal sehingga dapat mewujudkan pembangunan dan inovasi yang berkelanjutan.

TINJAUAN PUSTAKA

Konsep Inovasi

Inovasi seringkali dihubungkan dengan hal baru, originil dalam tindakan serta ide-ide baru dalam suatu kegiatan ([Mulgan dan Albury, 2003](#)). Pada sisi lain, suatu program, kebijakan atau aksi dapat disebut sebagai inovasi tidak hanya membahas tentang ide-ide baru saja melainkan adanya praktik baru dalam pelaksanaannya, inilah yang membedakan antara penemuan (*invention*) dan pembaharuan (*innovation*). Dalam konteks perubahan perilaku, inovasi terkait erat dengan lingkungan yang dinamis dan berkembang ([Suwarno, 2008](#)).

Inovasi didefinisikan mencakup berbagai jenis, termasuk produk atau layanan baru, teknologi proses baru, struktur organisasi atau sistem administrasi baru atau program baru yang berkaitan dengan anggota organisasi ([Damanpour dan Schneider, 2006](#)). Inovasi adalah proses multi tahap di mana organisasi mengubah ide menjadi produk, layanan atau proses baru/lebih baik, untuk maju bersaing dan sukses di pasar. Dalam definisi terkait teknologi, fokus utama inovasi sebagai produk terkait dengan teknologi baru ([Baregheh dkk., 2009](#)).

Pengelolaan Inovasi

Menurut [Utomo \(2017\)](#) di dalam bukunya yang berjudul inovasi harga mati, bahwa terdapat rangkaian tahap dalam mengelola inovasi di sektor publik yaitu:

1. Eksplorasi ide dan kebutuhan inovasi. Fase ini bertujuan untuk menemukan sesuatu yang baru, sedang kebutuhan dalam pembentukan inovasi harus dapat melihat kebutuhan apa yang diperlukan supaya dalam penciptaan inovasi sesuai dengan yang menjadi kebutuhan sehingga inovasi tidak sia-sia.
2. Inkubasi inovasi. Usaha atau inisiatif baru memerlukan uji coba atau *piloting* sebelum dijalankan secara keseluruhan. Fase inkubasi ini mencakup pemberian pelatihan dan program kegiatan lainnya sebagai bagian dari kemampuan inovasi.

3. Diseminasi inovasi. Saat inisiatif inovasi sudah mulai berjalan, dibutuhkan komunikasi kepada pihak yang terlibat seperti melalui sosialisasi uji publik. Selain untuk memperoleh *feedback* dan *enrichment* dari pihak luar, diseminasi juga bertujuan untuk menginspirasi pihak lain untuk melakukan inovasi sesuai dengan ketertarikan dan lingkup pekerjaannya.
4. Replikasi/modifikasi inovasi. Dengan telah dilakukannya diseminasi, diharapkan akan mengungkit kesadaran dan kemauan untuk berinovasi dari pihak-pihak yang belum berinovasi. Sudah tidak perlu memulai dari tahap menumbuhkan ide/inisiatif untuk inovasi namun langsung bisa mengadopsi inovasi yang sudah berjalan di tempat lain.
5. Aktualisasi inovasi. Tahap ini adalah pelaksanaan inovasi dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan. Dalam pelaksanaan harus dilakukan *monitoring* dan evaluasi terhadap inovasi yang dijalankan.

Inovasi Pemerintah Daerah

Era otonomi daerah telah memberi otoritas kepada Pemda untuk menyelenggarakan pemerintahannya agar bisa menjadi lebih mandiri dalam mengatur rumah tangganya. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 dijelaskan bahwa dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintah, pemerintah daerah dapat menerapkan inovasi. Kewenangan Pemda untuk melakukan inovasi daerah dinyatakan pada Peraturan No. 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah. Dijelaskan bahwa inovasi daerah bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, untuk mencapai tujuan tersebut, maka sasaran inovasi daerah diarahkan untuk mempercepat tercapainya kesejahteraan masyarakat melalui 1) Peningkatan pelayanan publik; 2) Pemberdayaan dan peran serta masyarakat; 3) Peningkatan daya saing daerah. Dalam Peraturan ini disebutkan bentuk inovasi daerah meliputi 1) Inovasi tata kelola pemerintahan daerah; 2) Inovasi pelayanan publik; 3) Inovasi daerah lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Kriteria inovasi daerah dalam PP No. 38 Tahun 2017 meliputi : 1) mengandung pembaharuan seluruh atau sebagian unsur dari inovasi; 2) memberi manfaat bagi daerah dan masyarakat; 3) tidak mengakibatkan pembebanan atau pembatasan pada masyarakat yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 4) merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah; 5) dapat direplikasi.

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Proses Pengelolaan Inovasi Daerah

[Alberti dan Bertucci \(2006\)](#) dalam [Rahman dan Tarigan \(2020\)](#) mengungkapkan terdapat faktor-faktor dibutuhkan agar inovasi pemerintah dapat berjalan baik dan berkelanjutan :

1. Pengembangan Sumber Daya Manusia. Kemampuan inovasi aparatur pemerintah akan berkelanjutan jika difasilitasi akses teknologi, akses yang dimaksud adalah akses dalam menjangkau sumber pengetahuan dan keahlian.
2. Budaya Organisasi. Budaya yang menekankan kreativitas dan inovasi, mendorong tumbuhnya inovasi seperti kerja tim, kebebasan berekspresi, dan penghargaan bagi yang berinovasi.
3. Kerjasama. Pengembangan inovasi membutuhkan adanya kerjasama, karena sistem inovasi bukan pekerjaan individual, dibutuhkan kerjasama yang sejalan dan selaras.
4. Jejaring Kemitraan. Dalam menciptakan suatu inovasi dibutuhkan jejaring dan kemitraan yang dijalin diluar institusi. Hal ini mengingat di dalam institusi terbatas pada beberapa bidang keahlian saja.

[United Nations \(2015\)](#) dalam [Andhika \(2018\)](#) mengungkapkan faktor-faktor penting dalam inovasi pelayanan publik pemerintah yaitu

1. Kelembagaan. Lembaga pemerintah bertanggung jawab dan menjadi penghubung antara pemerintah dan masyarakat. Terdapat tiga pilar analisis kelembagaan yakni :
 - a. *Regulative systems* yang baik akan meningkatkan dan mengawasi kinerja lembaga secara berkesinambungan dengan berbagai kebijakan sebagai landasan hukum.
 - b. *Normative systems*, nilai dan kepatuhan aparatur pelayanan publik dengan berbagai keputusan dan kebijakan dapat mempermudah capaian tujuan yang direncanakan.
 - c. *Cultural cognitive systems*, budaya inovasi ada pada perilaku dalam diri individu. Diartikan sebagai sikap, pengalaman, kepercayaan, kebiasaan dan nilai.
2. Aktor kebijakan. Aktor kebijakan menghasilkan kebijakan dan kesepakatan sumber daya untuk mengelola inovasi dengan cara inovatif. Aktor kebijakan akan menentukan produk kebijakan.
3. Partisipasi Masyarakat. [Michels \(2012\)](#) menyatakan partisipasi masyarakat meningkatkan dan memperdalam pengambilan keputusan. Tantangan keterlibatan masyarakat ada pada kemampuan masyarakat.

Mulgan (2014) mengungkapkan inovasi sektor publik menuju terwujudnya *good public policy governance*, terdapat faktor-faktor yang berpengaruh yaitu :

1. Kepemimpinan. Diperlukan komitmen yang sangat jelas dari para pemimpin baik tentang politik, ekonomi, sosial, budaya maupun aspek kebijakan lainnya, dengan demikian publik dapat melihat keputusan kepemimpinan menjadi arah dan meminimalkan risiko.
2. Keuangan/anggaran. Organisasi dalam melakukan inovasi tidak selalu bergantung pada aspek keuangan, akan tetapi keuangan yang memadai akan sangat membantu keberhasilan inovasi.
3. Sumber Daya Manusia. Perpaduan keahlian dan keterampilan sumber daya manusia *soft skill* maupun *hard skill* sangat penting bagi organisasi sektor publik dalam melakukan inovasi.
4. Budaya inovasi. Membangun budaya inovasi diperlukan 4 tahap yaitu menciptakan inovasi, mengembangkan ide dan melakukan prioritas, proses menjaga dan merawat ide dan membangun budaya inovasi.

Beberapa faktor penting yang berpengaruh dalam pengembangan inovasi pemerintah daerah seperti diungkapkan oleh [Yaározatulo Harefa \(2021\)](#) adalah 1) Sumber Daya Manusia; 2) Partisipasi Masyarakat; 3) Kepemimpinan; 4) Infrastruktur; 5) Manajemen Informasi; 6) Lingkungan bisnis (swasta). Sementara [Dema dkk., \(2021\)](#) mengungkapkan terdapat faktor yang menentukan keberhasilan inovasi tata kelola pemerintahan daerah yaitu 1) Kepemimpinan; 2) Kelembagaan; 3) Modernisasi sektor publik; 4) Masyarakat sipil yang terorganisir; 5) Budaya demokrasi; 6) Tingkat kepercayaan publik; 7) Faktor komunikasi, koordinasi dan sinergitas.

Proposisi Teoritik

Dalam penelitian ini terdapat proposisi, yang merupakan dugaan sementara terhadap hal yang menjadi bahan kajian. Adapun proposisi teoritik dalam penelitian ini adalah :

1. Perkembangan Pengelolaan inovasi daerah yang dilakukan oleh Bidang Litbang Pemerintah Kota Bekasi tahun 2017-2022, dijabarkan dalam kurun waktu per tahun atau periode terdiri dari eksplorasi ide dan kebutuhan inovasi, inkubasi inovasi, diseminasi inovasi, replikasi inovasi, dan aktualisasi inovasi.

2. Faktor-faktor yang mendekati dan diduga berpengaruh dalam perkembangan pengelolaan inovasi daerah yang dilakukan oleh Bidang Litbang Pemerintah Kota Bekasi tahun 2017-2022, berawal dari proposisi teoritik penjabaran :
 - a. *United Nations* (2015) :
 1. Kelembagaan meliputi sistem regulasi dan budaya inovasi
 2. Aktor kebijakan meliputi kepemimpinan dan sumber daya manusia
 - b. Mulgan (2014) yaitu keuangan/anggaran
 - c. Yaározatulo Harefa (2021) yaitu infrastruktur
 - d. Alberti dan Bertucci (2006) dalam Rahman dan Tarigan (2020) yaitu kerjasama
 - e. Dema dkk., (2021) yaitu faktor komunikasi, koordinasi, sinergitas.

METODE PENELITIAN

Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian kualitatif menggunakan metode studi kasus. Metode kualitatif dipilih karena untuk memperoleh berbagai informasi, mengeksplorasi serta mengidentifikasi fenomena yang terjadi secara sentral sehingga diperoleh informasi mendalam dan menyeluruh dari konteks alamiah di lapangan. Menurut [Yin \(2018\)](#) metode studi kasus adalah metode empiris yang menyelidiki fenomena kontemporer (kasus) secara menyeluruh dan mendalam serta dalam konteks dunia nyata, terutama ketika batas antara fenomena dan konteks mungkin tidak terlihat dengan jelas. Hingga memperoleh suatu pemahaman dan gambaran detail tentang fenomena tersebut secara komprehensif.

Penalaran abduktif digunakan dalam penelitian studi kasus, yakni dengan membawa proposisi teori ke lapangan untuk diperkaya dengan temuan di lapangan ([Dubois dan Gadde, 2002](#)). Pendekatan abduktif yang digagas adalah buah dari pemikiran Peirce (1893) menjelaskan bahwa abduksi merupakan proses yang sah untuk merumuskan hipotesis. Abduksi merupakan salah satu bentuk silogisme yang bertolak dari fakta/kasus. Sehingga dari fakta tersebut, merumuskan suatu hipotesis untuk menjelaskan kasus sehingga hipotesis yang disusun tersebut mengandung makna general atau universal.

Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini terdapat dua jenis pengumpulan data yang digunakan:

1. Data Primer, diperoleh dengan cara yaitu wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan pemilihan sampel secara *snowball sampling* yang menekankan pada kedalaman informasi terhadap objek yang diteliti.
2. Data Sekunder adalah data yang didapatkan peneliti secara tidak langsung melalui media perantara atau data yang diperoleh sebagai sumber kedua ([Sugiyono, 2019](#)). Data sekunder dapat diperoleh melalui surat, memorandum, pengumuman resmi, laporan peristiwa, dokumen administrasi, website, *youtube* dan artikel lain yang sesuai.

Teknik Analisis Data

Yin (2002) dalam proses analisis data di penelitian studi kasus menjelaskan bentuk-bentuk analisis dominan yang terdiri dari penjadohan pola, pembuatan eksplanasi, serta melakukan analisis deret waktu, dengan penjelasan seperti berikut:

1. Penjadohan Pola, analisis penjadohan pola dilakukan dengan membandingkan pola yang didasarkan atas temuan empirik pada kasus perkembangan pengelolaan inovasi daerah beserta faktor-faktor apa saja yang berpengaruh dengan pola yang diperkirakan pada proposisi teoritik. Apabila kedua pola mempunyai persamaan, maka hasilnya menguatkan validitas internal pada studi kasus tersebut.
2. Pembuatan Eksplanasi, dari penjadohan pola tersebut selanjutnya dilakukan analisis pembuatan eksplanasi, dengan menganalisis kasus perkembangan pengelolaan inovasi daerah beserta faktor-faktor apa saja yang berpengaruh dengan cara membuat penjelasan beserta narasi diantaranya membandingkan temuan empirik dengan proposisi teoritik serta membandingkan dengan kasus lain/kasus sejenis
3. Analisis Deret Waktu, analisis ini menggunakan deret waktu secara kronologis, yang mana peristiwa harus selalu terjadi sebelum peristiwa lain. Penelitian ini berupaya merangkai peristiwa-peristiwa kedalam kronologis tertentu.

Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah di Kota Bekasi, dipilih karena tiga hal yakni 1) Kota Bekasi sebagai kota paling siap dalam mengimplementasikan inisiatif kota inovatif menurut *Indonesia Smart Nation Award* (ISNA) tahun 2018; 2) Mendapatkan penghargaan juara 1 lomba inovasi daerah dalam ajang IGA tahun 2021 kategori pelayanan terpadu dalam rangka penanganan pandemi; 3) Sebagai salah satu wilayah dengan jumlah penduduk terbesar di

Jawa Barat yaitu 2.470.972 Jiwa ([BPS, 2020](#)). Dengan tingginya jumlah penduduk. Kota Bekasi mampu menjadi salah satu kawasan industri, jasa, infrastruktur sehingga memiliki daya saing dengan kota besar di sekitarnya.

HASIL DAN DISKUSI

Perkembangan Pengelolaan Inovasi Daerah

Inovasi Pemerintah Daerah Kota Bekasi dirintis dan terbentuk pada tahun 2017. Pada awal terbentuk dikenal dengan nama Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang). Tahun 2020 terjadi penggabungan kelembagaan dengan Badan Perencanaan Daerah (Bapeda), sehingga berganti nama menjadi Bappelitbangda. Dalam perkembangan pengelolaan inovasi daerah Kota Bekasi terkategori dalam 3 periodisasi yaitu Periode Ke 1 Tahun 2017, Periode Ke 2 Tahun 2018-2019, dan Periode Ke 3 Tahun 2020-2022.

Periode Ke 1 Tahun 2017

Pada periode ke 1 tahun 2017 tahapan perkembangan pengelolaan inovasi daerah terdapat tiga rangkaian tahapan yaitu:

1. Eksplorasi ide dan kebutuhan inovasi.

Periode ke 1 sebagian besar organisasi perangkat daerah belum memiliki kesadaran dan pemahaman bahwa badan atau dinasnya memiliki sebuah inovasi. Perangkat daerah menganggap inovasi yang ada dalam organisasinya merupakan sebuah aktivitas pekerjaan dan pelayanan publik, yang tujuannya memberi solusi di tengah berbagai permasalahan di masyarakat. Balitbang baru terbentuk sehingga budaya inovasi belum begitu terlihat.

2. Inkubasi Inovasi

Balitbang melakukan koordinasi dan komunikasi dengan bersurat dan via telepon kepada perangkat daerah untuk mendata inovasi. Secara organisasi, Balitbang juga masih berproses dalam penguatan internal, yang mana secara kapasitas kemampuan SDM belum siap karena masih berproses mempelajari akan tupoksi dan tanggung jawabnya. Pada periode ini, sudah bermunculan inovasi yang lahir dari perangkat daerah. Namun inovasi belum menjadi prioritas di dalam organisasi, karena secara kelembagaan Balitbang belum berkembang dan belum siap dalam memfasilitasi. pendataan dan pelaporan inovasi masih konvensional.

3. Aktualisasi Inovasi

Implementasi inovasi dijalankan di masing-masing perangkat daerah dan juga di masyarakat, dengan menghasilkan 9 inovasi daerah yaitu inovasi digital dan inovasi non digital dari 9 organisasi perangkat daerah di Kota Bekasi. Dengan dibentuknya Balitbang pada tahun 2017, maka di periode ini pula diselenggarakan kegiatan *Bekasi City Summit*, yaitu kegiatan inovasi layanan publik di bidang investasi.

Dalam perkembangan pengelolaan inovasi daerah Kota Bekasi periode ke 1 tidak terlepas dari beberapa ruang lingkup berikut ini :

a. Kebijakan Inovasi

Pemerintah mengeluarkan Peraturan Bersama Mendagri No 3 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah. Untuk mendukung peraturan tersebut, maka tidak lama berselang diterbitkan Peraturan tentang pelaksanaan Penguatan Sistem Inovasi Daerah. Pada periode ini juga lahir Perundang-Undangan No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

b. Bentuk Inovasi

Terdapat inovasi yang muncul di perangkat daerah yaitu 9 inovasi dari 8 organisasi perangkat daerah

c. Lomba Inovasi

Inovasi pemerintah Kota Bekasi tahun 2017 sudah mengikuti ajang *Innovative Government Award*. Pada ajang IGA Kota Bekasi tidak mempersiapkan secara matang karena Balitbang yang baru terbentuk. Kota Bekasi hanya ikut berpartisipasi dan memeriahkan kegiatan. Ini dikarenakan belum adanya komitmen yang kuat untuk mendapatkan apresiasi.

d. Aktor Kebijakan

Keterlibatan berbagai lintas sektor belum banyak, hanya didukung dengan keterlibatan beberapa aktor di antaranya tingkat pusat yaitu pusat Litbang inovasi daerah Kemendagri selaku pembina inovasi di level nasional, tingkat pemerintah daerah yaitu Balitbang, perangkat daerah kota Bekasi, meliputi badan/dinas yang menciptakan inovasi di organisasinya masing-masing.

Pada periode ke 1 tahun 2017 terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan pengelolaan inovasi Kota Bekasi diantaranya yaitu

1. Peraturan tentang kebijakan inovasi
2. Kesiapan lembaga

3. Kesiapan SDM
4. Budaya inovasi
5. Komitmen di ajang kompetisi

Periode 2 Tahun 2018 – 2019

Terdapat lima rangkaian tahapan pengelolaan inovasi pada periode Ke 2 di antaranya:

1. Eksplorasi ide dan kebutuhan inovasi.
Inovasi Kota Bekasi sudah mulai mengalami pengembangan namun belum signifikan. Dalam proses pendataan dan pelaporan inovasi masih manual dan melakukan kunjungan langsung ke perangkat daerah. Ketersediaan anggaran telah dialokasikan sesuai perencanaan.
2. Replikasi Inovasi.
Balitbang juga rutin melakukan studi banding, Terdapat inovasi yang lahir dari Disdukcapil yaitu E-Open, merupakan inovasi yang menyediakan layanan kependudukan yang diintegrasikan dalam satu aplikasi dan merupakan inovasi replikasi dari Surabaya.
3. Inkubasi Inovasi.
Inovasi yang muncul dari perangkat daerah meningkat, namun pendataan inovasi oleh Balitbang belum terhubung dengan teknologi informasi. Rangkaian program dan kegiatan inovasi yang dilakukan yaitu inisiasi, penataan administrasi, sosialisasi, asistensi, desk.
4. Diseminasi Inovasi.
Sebelum inovasi di *launching* kepada masyarakat, perangkat daerah wajib memenuhi kriteria inovasi berdasarkan indikator. Setelah dianggap memenuhi kriteria, maka melaksanakan forum dengan mengundang berbagai elemen di masyarakat atau biasa disebut dengan uji publik.
5. Aktualisasi Inovasi.
Terdapat sebanyak 43 inovasi daerah yang tercipta dengan rincian 11 inovasi dari 9 perangkat daerah di tahun 2018 dan 32 inovasi dari 20 perangkat daerah di tahun 2019. Dilakukan juga pembinaan kepada perangkat daerah berupa bimbingan teknis dan *monitoring* evaluasi.

Dalam perkembangan pengelolaan inovasi tidak terlepas dari beberapa ruang lingkup:

a. Kebijakan inovasi.

Kebijakan pada periode 2, diperkuat dengan diterbitkannya PP Nomor 38 Tahun 2017 tentang inovasi daerah. Selanjutnya terbit Permendagri No 104 Tahun 2018 tentang pengukuran, penilaian dan pemberian penghargaan atau insentif inovasi daerah.

b. Bentuk Inovasi.

Inovasi yang lahir pada periode ke 2 tahun 2018-2019 sebanyak 43 inovasi daerah, dengan semakin meningkat jumlah inovasi yang diciptakan maka menunjukkan perilaku budaya inovasi sudah semakin melekat pada masing-masing pegawai dan organisasi perangkat daerah.

c. Lomba inovasi.

Pemerintah Kota Bekasi mengikutkan inovasi Sistem Jaminan Online IGA tahun 2018, menerima TOP IT Digital Awards Tahun 2019 melalui inovasi pembangunan *Patriot Decision Support System* dan *Implementation 2019 on City Government* milik dari DiskominfoStandi. Kota Bekasi juga mengikuti Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik dan Kompetisi Inovasi Jawa Barat

d. Aktor kebijakan.

Adanya kerjasama dan koordinasi dari berbagai aktor dalam pengelolaan inovasi daerah Kota Bekasi sudah berkembang diantaranya Badan Penelitian dan Pengembangan Kemendagri, Deputi Bidang Pelayanan Publik Kemenpan RB, Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Jawa Barat, Bappelitbangda dan Bidang Organisasi Setda Kota Bekasi, Perangkat Daerah Kota Bekasi, Tim Walikota Untuk Percepatan Penyelenggara Pemerintah Pembangunan (TWUP4).

Pada periode ke 2 tahun 2018-2019 terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan pengelolaan inovasi Kota Bekasi diantaranya:

1. Peraturan inovasi daerah
2. Program dan kegiatan inovasi
3. Kapasitas aparatur
4. Anggaran
5. Budaya inovasi
6. Pendataan dan pelaporan inovasi
7. Ajang kompetisi dan apresiasi

8. Kerjasama dan koordinasi

Periode Ke 3 Tahun 2020-2022

Pada periode ke 3 tahapan perkembangan pengelolaan inovasi daerah sama seperti periode sebelumnya, sudah terdapat lima rangkaian tahapan sebagai berikut:

1. Eksplorasi ide dan kebutuhan inovasi

Ide dan gagasan inovasi OPD sudah makin tumbuh dan berkembang serta terus didorong oleh Litbang untuk tidak hanya menciptakan inovasi namun keberlanjutan inovasi. Pendataan dan pelaporan inovasi sudah menggunakan TIK yaitu berupa inovasi aplikasi Sidik Jari

2. Replikasi Inovasi

Periode ini studi banding terus di lakukan untuk melihat perkembangan inovasi daerah lain. Namun perangkat daerah tidak ada yang mereplikasi inovasi daerah lain.

3. Inkubasi Inovasi

Rangkaian proses penguatan inovasi seperti sosialisasi, Bimtek, rapat kerja inovasi, asistensi, dan desk untuk kuantitasnya terus ditingkatkan, yang sebelumnya berjumlah 5 kali, pada tahun 2021 menjadi ada penambahan 7 kali desk.

4. Diseminasi Inovasi

Adanya pelaksanaan uji publik mengundang *stakeholder* seperti tokoh masyarakat, swasta dan pemerintah untuk memperkenalkan inovasi yang telah di buat dengan menerima masukan dan saran sebelum inovasi di launching kepada masyarakat.

5. Aktualisasi Inovasi

Terdapat sebanyak 157 inovasi yang dihasilkan perangkat daerah. Alokasi anggaran yang memadai dengan anggaran sejumlah Rp.450.000.000 sehingga berbagai kegiatan dapat terlaksana. Periode Ke-3 ini terjadi pergantian Wali Kota, namun kepemimpinan Plt Walikota tetap menunjukkan performanya yaitu konsisten meneruskan kebijakan *one agency one innovation* dan menyelenggarakan kegiatan Bekasi Keren.

Dalam perkembangan pengelolaan inovasi periode 3 tidak terlepas dari beberapa ruang lingkup berikut ini:

1. Kebijakan Inovasi

Adanya Perda Kota Bekasi No 02 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Perda Kota Bekasi No 07 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah.

Dalam rangka mensukseskan program *one agency one innovation* Kota Bekasi dikeluarkan Instruksi Walikota Bekasi No: 067/511/Bappelitbangda Litbang yang mana setiap perangkat daerah wajib menciptakan minimal satu inovasi setiap tahunnya.

2. Bentuk Inovasi

Inovasi mengalami jumlah peningkatan yang tinggi dan sudah sangat berkembang, yang mana tahun 2020 tercipta inovasi sebanyak 54 inovasi dari 26 perangkat daerah, selanjutnya tahun 2021 tercipta inovasi sebanyak 48 inovasi dari 28 perangkat daerah dan tahun 2022 tercipta 55 inovasi dari 28 perangkat daerah.

3. Lomba Inovasi

Wali Kota Bekasi mengeluarkan Instruksi No: 067/511/Bappelitbangda Litbang tentang Gerakan Satu Instansi Satu Inovasi melalui penyelenggaraan *Bekasi Innovation Week*. Kota Bekasi meraih 10 besar kota terinovatif dari dan mendapatkan Piala *Innovative Government Award* serta mengikuti Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik dan Kompetisi Inovasi Jawa Barat.

4. Aktor Kebijakan

Adanya kerjasama dan koordinasi lintas sektor yang terlibat dalam pengelolaan inovasi Kota Bekasi, perkembangan aktor kebijakan hampir sebagian besar sama dengan periode ke 2 sebelumnya yaitu Badan Litbang Kemendagri, Peneliti ahli madya BP2D Provinsi Jawa Barat, Bidang Litbang Kota Bekasi, Bagian Organisasi Sub Bagian Tatalaksana Sekretariat Daerah Kota Bekasi, Perangkat Daerah Kota Bekasi, Tim Walikota Untuk Percepatan Penyelenggara Pemerintah dan Pembangunan, Akademisi dari Universitas 45 Bekasi dan Pusat Pengembangan Kawasan Strategis dan Sistem Inovasi BPPT atau BRIN.

Pada periode ke 3 tahun 2020-2022 terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan pengelolaan inovasi Kota Bekasi diantaranya

1. Peraturan perundangan
2. Kepala daerah
3. Kelembagaan
4. Penggunaan TIK
5. Anggaran
6. Jumlah inovasi
7. Kerjasama dan koordinasi

8. Penghargaan

Kajian Lintas Periode Perkembangan Pengelolaan Inovasi Daerah

1. Perpindahan Periode Ke 1 Menuju Periode Ke 2

Perkembangan pengelolaan inovasi mengalami perpindahan dari periode ke 1 menuju periode ke 2 yang didasarkan beberapa faktor yaitu peraturan perundangan, kesiapan lembaga, kapasitas pegawai, budaya inovasi, dan komitmen di ajang kompetisi.

2. Perpindahan Periode Ke 2 Menuju Periode Ke 3

Perkembangan pengelolaan inovasi mengalami perpindahan dari periode ke 2 menuju periode ke 3 yang didasarkan atas beberapa faktor yaitu kelembagaan, pelaporan dan pendataan inovasi, peraturan inovasi, program dan kegiatan inovasi, anggaran, kerjasama dan koordinasi, penghargaan.

Perbandingan Proposisi Teoritik terhadap Hasil Temuan Lapangan

1. Perbandingan Tahapan Perkembangan Pengelolaan Inovasi Daerah Antar Periode

Perkembangan pengelolaan inovasi Kota Bekasi tahun 2017 - 2022 berdasarkan hasil empirik terdapat urutan yaitu eksplorasi ide dan kebutuhan inovasi, replikasi inovasi, inkubasi inovasi, diseminasi inovasi dan aktualisasi inovasi. Adapun urutan rangkaian pengelolaan inovasi daerah berdasarkan proposisi teoritik sedikit berbeda,

Tabel 1.
Komparasi Hasil Empirik Dengan Proposisi Teoritik Perkembangan Pengelolaan Inovasi Daerah Antar Periode

Hasil Empirik Perkembangan Pengelolaan Inovasi Daerah	Proposisi Teoritik Perkembangan Pengelolaan Inovasi Daerah
Eksplorasi ide dan gagasan	Eksplorasi ide dan gagasan
Replikasi inovasi	Inkubasi inovasi
Inkubasi inovasi	Diseminasi inovasi
Diseminasi inovasi	Replikasi inovasi
Aktualisasi inovasi	Aktualisasi inovasi

Sumber : Analisis Peneliti (2023)

2. Perbandingan Faktor-faktor yang Mempengaruhi Perkembangan Pengelolaan Inovasi Daerah Kota Bekasi Antar Periode

Berdasarkan hasil analisis perpindahan periode 1 menuju periode 2 dan perpindahan periode 2 menuju periode 3. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi perkembangan pengelolaan inovasi Kota Bekasi antar keseluruhan periode yaitu peraturan perundangan, kelembagaan, kapasitas SDM, Anggaran, Penggunaan TIK, Budaya inovasi, Kerjasama dan Koordinasi, Penghargaan. Apabila membandingkan temuan empirik dengan proposisi teoritik terdapat beberapa faktor yang berbeda.

Tabel 2.

Komparasi Hasil Empirik Dengan Proposisi Teoritik Faktor-faktor yang mempengaruhi Proses Pengelolaan Inovasi Daerah Antar Periode

Hasil Empirik	Proposisi Teoritik
Kelembagaan	Kelembagaan
Peraturan Perundangan	Sistem regulasi
Budaya Inovasi	Budaya inovasi
-	Kepemimpinan
Kapasitas Sumber Daya Manusia	Sumber Daya Manusia
Anggaran	Anggaran
Penggunaan TIK	Infrastruktur
Kerjasama	Kerjasama
Koordinasi	Koordinasi
Penghargaan	-

Sumber : Analisis Peneliti 2023

Berdasarkan komparasi hasil empirik dan proposisi teoritik di atas, dalam penelitian ini memunculkan dua hal yaitu pertama, pada proposisi teoritik terdapat faktor kepemimpinan sedangkan pada hasil empirik tidak di temukan faktor kepemimpinan. Kedua terdapat faktor baru yang mempengaruhi perkembangan pengelolaan inovasi daerah yang dilakukan oleh Bidang Litbang Pemerintah Kota Bekasi Tahun 2017-2022, yang mana faktor diluar proposisi teoritik tersebut adalah faktor penghargaan

PENUTUP

Perkembangan pengelolaan inovasi daerah yang dilakukan oleh Bidang Litbang Pemerintah Kota Bekasi tahun 2017-2022 terjadi dalam 3 periodisasi :

1. Periode Ke 1 Tahun 2017 adalah awal berdirinya Balitbang. Secara kelembagaan karena baru terbentuk, Balitbang dalam proses penguatan kelembagaan secara internal mencakup proses adaptasi, pembelajaran dan penyesuaian dengan tupoksi dan lingkungan kerja. Rangkaian tahapan perkembangan pengelolaan inovasi daerah yang dilakukan adalah eksplorasi ide dan kebutuhan inovasi, inkubasi inovasi dan

- aktualisasi inovasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi periode ke 1 yaitu peraturan tentang kebijakan inovasi, kesiapan lembaga, kesiapan SDM, budaya inovasi, dan komitmen di ajang kompetisi.
2. Periode Ke 2 Tahun 2018-2019, mulai dilakukan implementasi program dan kegiatan inovasi dalam rangka penguatan inovasi seperti inisiasi, penataan administrasi, sosialisasi, asistensi, desk serta pelatihan dan bimbingan teknis. Tahapan perkembangan pengelolaan inovasi daerah yang dilakukan adalah eksplorasi ide dan kebutuhan inovasi, replikasi inovasi. inkubasi inovasi, diseminasi inovasi dan aktualisasi inovasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi periode ke 2 yaitu peraturan inovasi daerah, program dan kegiatan inovasi, kapasitas aparatur, anggaran, budaya inovasi, pendataan pelaporan inovasi, ajang kompetisi dan penghargaan, kerjasama dan koordinasi.
 3. Periode Ke 3 Tahun 2020-2022, merupakan periode di mana terjadi penggabungan kelembagaan yaitu Balitbang dan Bapeda dilebur menjadi Bappelitbagda. Pendataan dan pelaporan inovasi sudah menggunakan TIK melalui aplikasi sidik jari. Tahapan perkembangan pengelolaan inovasi daerah yang dilakukan adalah eksplorasi ide dan kebutuhan inovasi, replikasi inovasi. inkubasi inovasi, diseminasi inovasi dan aktualisasi inovasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi yaitu peraturan perundangan, kepala daerah, kelembagaan, penggunaan TIK, anggaran, jumlah inovasi, kerjasama dan koordinasi, penghargaan.
 4. Terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan pengelolaan inovasi daerah lintas periode diantaranya faktor yang mempengaruhi pada periode 1 ke periode 2 yakni peraturan perundangan, kesiapan lembaga, kapasitas pegawai, budaya inovasi, komitmen di ajang kompetisi. Kemudian faktor yang mempengaruhi pada periode 2 ke periode 3 yakni kelembagaan, pelaporan dan pendataan inovasi, peraturan inovasi, program dan kegiatan inovasi, anggaran, kerjasama dan koordinasi, penghargaan.

Modifikasi Teoritik

Dari hasil penelitian perkembangan pengelolaan inovasi daerah Pemerintah Kota Bekasi di temukan adanya modifikasi dan teori baru yaitu :

1. Pada rangkaian tahapan perkembangan pengelolaan inovasi daerah Kota Bekasi terdapat modifikasi dalam urutan perkembangan pengelolaan inovasi daerah yang

terdiri dari eksplorasi ide dan gagasan, replikasi inovasi, inkubasi inovasi, diseminasi inovasi dan aktualisasi inovasi.

2. Pada faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan pengelolaan inovasi daerah yaitu peraturan perundangan, kelembagaan, kapasitas SDM, anggaran, penggunaan TIK, budaya inovasi, dan penghargaan yang merupakan teori baru.
3. Terdapat modifikasi teori baru yang muncul dari faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan pengelolaan inovasi daerah yaitu faktor penghargaan. Munculnya faktor penghargaan dikarenakan adanya penghargaan memberikan motivasi untuk menciptakan inovasi.

Implikasi Kebijakan

Dari hasil pembahasan proses pengelolaan inovasi daerah yang dilakukan oleh Bidang Litbang Pemerintah Kota Bekasi diatas, terdapat beberapa saran untuk rekomendasi pengembangan inovasi daerah di masa mendatang yaitu :

1. Perlunya merencanakan untuk menambah kegiatan ajang penghargaan atau apresiasi tidak hanya penyelenggaraan ajang *Bekasi Innovation Week* yang diselenggarakan setahun sekali. Namun ajang penghargaan lain, yang kedepannya dapat memberikan apresiasi lebih luas lagi kepada pegawai maupun perangkat daerah.
2. Dalam perjalanan inovasi daerah selama enam tahun, perlunya mengembangkan manajemen inovasi daerah, tidak hanya sebatas mengelola inovasi, namun juga melakukan upaya sistematis dalam merencanakan, menganalisis, memonitor, mengorganisir kegiatan inovasi daerah sehingga Kota Bekasi dapat meningkatkan daya saingnya secara terukur di publik dan dapat mempertahankan keberlanjutan inovasi.
3. Pemerintah daerah perlu melakukan sosialisasi (*marketing*) untuk menarik investor untuk dapat bermitra ataupun melalui program *corporate social responsibility* untuk mengembangkan inovasi daerah. pemerintah perlu mengawalinya dengan pembuatan rencana kemitraan yang memungkinkan pihak luar dapat mengambil peran dan berbagi sumber daya untuk kemajuan inovasi daerah.
4. Dalam penggunaan TIK, pengembangan sebuah inovasi cerdas yang dapat mengintegrasikan berbagai inovasi layanan sektor publik berbasis digital dalam satu layanan aplikasi sangat dibutuhkan, sehingga memudahkan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan layanan publik.

5. Dalam pengembangan inovasi terkait adanya kolaborasi dan kerjasama baik di internal pemerintah Kota Bekasi maupun dengan pihak luar, pembagian peran dan tanggung jawab sumber daya manusia dapat tergambar jelas, akan tugas dan fungsinya masing-masing agar inovasi dapat berjalan optimal.
6. Layanan aplikasi sidik jari yang memuat indikator indeks inovasi daerah serta informasi inovasi, dapat juga diakses secara luas oleh masyarakat sehingga masyarakat dapat teredukasi dan ikut berpartisipasi dalam peningkatan inovasi.
7. Perlunya dibuat *knowledge management system* bagi SDM pemerintah daerah, sehingga semakin menunjang kemampuan dan keahlian dalam bekerja serta menguatkan budaya untuk terus belajar, berkeaktivitas dan berinovasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abnur, A. (2017). [Inovasi Meningkatkan Mutu Pelayanan Publik](#). In *Inovasi Harga Mati* (Cetakan Ke). PT Raja Grafindo Persada.
- Alberti, & Bertucci. (2006). [Innovations in Governance and Public Administration: Replication What Works](#). *Journal Department of Economic and Social Affairs*.
- Ancok, D. (2012). *Psikologi Kepemimpinan dan Inovasi*. PT Erlangga.
- Andhika, L. R. (2018). [Elemen dan Faktor Governansi Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah](#). *Inovasi Pembangunan : Jurnal Kelitbangan*, 6(03), 207–222. <https://doi.org/10.35450/jip.v6i03.112>
- Andriushchenko, K., Liezina, A., Vasylichak, S., Manylich, M., Shterma, T., & Petrynyak, U. (2022). Management of the Development of the Innovative Potential of the Region. *TEM Journal*, 11(1), 339–347. <https://doi.org/10.18421/TEM111-43>
- Annisah. (2017). [Usulan Perencanaan Smart City : Smart Governance Pemerintah Daerah Kabupaten Mukomuko*](#). *Masyarakat Telematika Dan Informasi : Jurnal Penelitian Teknologi Informasi Dan Komunikasi*, 8(1), 59. <https://doi.org/10.17933/mti.v8i1.103>
- Baregheh, A., Rowley, J., & Sambrook, S. (2009). [Towards a multidisciplinary definition of innovation](#). *Management Decision*, 47(8), 1323–1339. <https://doi.org/10.1108/00251740910984578>
- Bolívar, M. P. R., & Meijer, A. J. (2015). Smart Governance: Using a Literature Review and Empirical Analysis to Build a Research Model. *Social Science Computer Review*, 34(6), 1–20. <https://doi.org/10.1177/0894439315611088>
- BPS. (2020). [Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat](#). <https://jabar.bps.go.id/indicator/12/133/1/jumlah-penduduk-menurut-kabupaten-kota.html>
- Camboim, G. F., Zawislak, P. A., & Pufal, N. A. (2019). Diving elements to make cities smarter: Evidences from European projects. *Technological Forecasting and Social Change*, 142, 154–167. <https://doi.org/10.1016/j.techfore.2018.09.014>
- Case study research and applications: Design and methods*. (n.d.).
- Chesbrough, H. W. (2016). Open Innovation from Technology. *Harvard Business School Press, Fall*, 2–3.
- Chourabi, H., Nam, T., Walker, S., Gil-Garcia, J. R., Mellouli, S., Nahon, K., Pardo, T. A., & Scholl, H. J. (2012). Understanding smart cities: An integrative framework. *Proceedings of the Annual Hawaii International Conference on System Sciences*, 2289–2297. <https://doi.org/10.1109/HICSS.2012.615>

- Damanpour, F., & Schneider, M. (2006). [Phases of the adoption of innovation in organizations: Effects of environment, organization and top managers](https://doi.org/10.1111/j.1467-8551.2006.00498.x). *British Journal of Management*, 17(3), 215–236. <https://doi.org/10.1111/j.1467-8551.2006.00498.x>
- De Vries, H., Bekkers, V., & Tummers, L. (2016). Innovation in the public sector: A systematic review and future research agenda. *Public Administration*, 94(1), 146–166. <https://doi.org/10.1111/padm.12209>
- Dema, H., Alamsah D, N., Mulyaman, R., & Rahmatunnisa, M. (2021). [Inovasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah Di Kabupaten Bantaeng](https://doi.org/10.55678/prj.v9i2.542). *PRAJA: Jurnal Ilmiah Pemerintahan*, 9(2), 64–75. <https://doi.org/10.55678/prj.v9i2.542>
- Dewanti, S. T., & Hanggara, B. T. (2021). *Evaluasi Proses Pengelolaan Inovasi dan Pengelolaan Penerimaan Perubahan dan Transisi Menggunakan Framework COBIT 5 pada Dinas Tenaga Kerja , Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang*. 5(3).
- Domai, D. T. (2011). *Sound Governance* (Cetakan Pe). UB Press.
- Doyle, L., McCabe, C., McCann, M., Keogh, B., & Brady, A. (2020). An overview of the qualitative descriptive design within nursing research. *Journal of Research in Nursing*, 25(5), 443–455. <https://doi.org/10.1177/1744987119880234>
- Dubois, A., & Gadde, L. E. (2002). [Systematic combining: An abductive approach to case research](https://doi.org/10.1016/S0148-2963(00)00195-8). *Journal of Business Research*, 55(7), 553–560. [https://doi.org/10.1016/S0148-2963\(00\)00195-8](https://doi.org/10.1016/S0148-2963(00)00195-8)
- Eggers, W. D., & Singh, S. K. (2009). *The Public Innovator's Playbook: Nurturing Ideas In Government*. Harvard Kennedy School.
- Febrian, R. A. (2018). Inovasi Daerah dari Perspektif Regulasi, Konseptual dan Empiris (Tinjauan terhadap Pasal 386 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah). *Jurnal Kajian Pemerintah*, IV(1), 44–55.
- Firah, M. (2021). *Menilik Kinerja Pelayanan Publik Di Kota Bekasi*. Kumparan. <https://kumparan.com/mus-firah-1609686789057747773/menilik-kinerja-pelayanan-publik-di-kota-bekasi-1x4zyuO81Gs/full>
- Fitriana, D. N. (2014). Inovasi Pelayanan Publik BUMN (Studi Deskriptif tentang Inovasi Boarding Pass System dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kereta Api PT KAI di Stasiun Gubeng Surabaya). *Kebijakan Dan Manajemen Publik*, 2(2), 1–10. <http://www.journal.unair.ac.id/download-fullpapers-kmp3c8840fbddfull.pdf>
- Fontana. (2009). *Innovative We Can! Manajemen Inovasi dan Penciptaan Nilai*. PT Gramedia Widiasarana Indonesia.

- Gibson, J. L., Ivancevich, J. M., & Donnelly, J. H. (2005). *Organization : Perilaku, Struktur, Proses* (Jilid 1-8/). Binarupsa Aksara.
- Halvorsen, T., Miles, L., Hauknes, J., & Roste, R. (2005). Innovation in the Public Sector On the differences between public and private sector innovation. *Innovation Policy Challenges for the 21st Century, January*, 64–85. <https://doi.org/10.4324/9780203084243-11>
- Handoko, T. H. (2005). *Manajemen*. BPFE.
- Hutagalung, S. S., & Hermawan, D. (2018). Membangun Inovasi Pemerintah Daerah. *Deepublish*, 1–215. <http://repository.lppm.unila.ac.id>
- Hutauruk, T. R. (2010). Tinjauan Daya Inovasi Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Desentralisasi Di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Timur. *Jurnal Borneo Administrator*, 6(3). <https://doi.org/https://doi.org/10.24258/jba.v6i3.66>
- Hutchison, D., & Mitchell, J. C. (2011). Future Internet Assembly. In *Smart Cities and the Future Internet: Towards Cooperation Frameworks for Open Innovation* (Vol. 9, Issue 3).
- Jiang, Y., & Chen, C. C. (2018). Integrating Knowledge Activities for Team Innovation: Effects of Transformational Leadership. *Journal of Management*, 44(5), 1819–1847. <https://doi.org/10.1177/0149206316628641>
- Keraf, A. S., & Dua, M. (2001). *Ilmu Pengetahuan Sebuah Tinjauan Filosofis*. Kanisius.
- Komninos, N. (2014). The age of intelligent cities: Smart environments and innovation-for-all strategies. *The Age of Intelligent Cities: Smart Environments and Innovation-for-All Strategies*, 1–278. <https://doi.org/10.4324/9781315769349>
- Kusumandari, E. (2020). Arah Kebijakan Pengembangan Smart Governance Di Kota Metro Dalam Urusan Pembangunan Dan Tata Ruang. *Institut Teknologi Sumatera*, 1–16. http://repo.itera.ac.id/assets/file_upload/SB2101250004/22116105_20_161445.pdf
- Kwan, L. Y. Y., Leung, A. K. Y., & Liou, S. (2014). Culture, creativity and innovation. *Journal of Cross-Cultural Psychology*, 45(4), 671–672. <https://doi.org/https://doi.org/10.1177/0022022114529381>
- Locke, E. A. (1968). Towards a theory of task motivation and incentives. *Organizational Behavior and Human Performance*, 3(2), 157–189. [https://doi.org/https://doi.org/10.1016/0030-5073\(68\)90004-4](https://doi.org/https://doi.org/10.1016/0030-5073(68)90004-4)
- Maria, E. (2010). *Hubungan Penghargaan Intrinsik Terhadap Motivasi Kerja*. 17(1), 1–9.
- Meijer, A., & Thaens, M. (2018). Urban Technological Innovation: Developing and Testing

- a Sociotechnical Framework for Studying Smart City Projects. *Urban Affairs Review*, 54(2), 363–387. <https://doi.org/10.1177/1078087416670274>
- Merrill, P. (2015). Innovation Never Stop: Innovation Generation the Culture, Process, and Strategy. *The Quality Management Journal; Milwaukee*, 22(4).
- Michels, A. (2012). [Citizen Participation in Local Policy Making: Design and Democracy](#). *International Journal of Public Administration*, 35(4), 285–292. <https://doi.org/https://doi.org/10.1080/01900692.2012.661301>
- Mohamad Zaenal Arifin & Arif Barata Sakti. (2017). [Peran Strategis Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Magelang dalam Menumbuhkembangkan Inovasi Daerah](#). *University Research Colloquium*, 1, 61–72.
- Mulgan, G. (2014). *Innovation in the Public Sector: How Can Public Organisations Better Create, Improve and Adapt?* <https://doi.org/10.2214/AJR.07.2082>
- Mulgan, G., & Albury, D. (2003). [Innovation in the Public Sector. Innovation Policy Challenges for the 21st Century](#), October, 64–85. <https://doi.org/10.4324/9780203084243-11>
- Mursalim, S. W. (2017). Implementasi Kebijakan Smart City Di Kota Bandung. *Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu Dan Praktek Administrasi*, 14(1), 126–138. <https://doi.org/10.31113/jia.v14i1.1>
- Nasution, S., Hotmaria, D., [Kabupaten Bogor Jl Segar III Kompleks Perkantoran Pemda Cibinong](#), B., & Bogor, K. (2021). *Bogor District Innovation Development To Improve the Community Satisfaction Index in 2021. Vol 1 No 1*(Agustus), 1–22.
- Nations, U. (2015). [Innovative Public Service Delivery: Learning from Best Practices](#). In *Report of the AdHoc Expert Group Meeting Innovating Public Service Delivery for Sustainable Development*.
- Nawawi, H. (2005). *Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Bisnis yang Kompetitif*. Gadjah Mada University Press.
- Nisa, L. S. (2022). Inovasi Daerah Refleksi dan Pengaturan Inovasi Daerah di Indonesia. *Jurnal Kebijakan Pembangunan*, 17(1), 107–120. <https://doi.org/10.47441/jkp.v17i1.274>
- Oliveira, L. S. de, Echeveste, M. E. S., Cortimiglia, M. N., & Gonçalves, C. G. C. (2017). Analysis of determinants for Open Innovation implementation in Regional Innovation Systems. *RAI Revista de Administração e Inovação*, 14(2), 119–129. <https://doi.org/10.1016/j.rai.2017.03.006>
- Plessis, M. du. (2007). The role of knowledge management in innovation. *Journal of*

- Knowledge Management*, 11(1), 20–29. <https://doi.org/10.1006/bbrc.2002.6651>
- Praharaj, S., Han, J. H., & Hawken, S. (2018). Towards the right model of smart city governance in India. *International Journal of Sustainable Development and Planning*, 13(2), 171–186. <https://doi.org/10.2495/SDP-V13-N2-171-186>
- Rahman, F., & Tarigan, J. S. R. (2020). *Inovasi Pemerintahan: Menuju Tata Kelola Pemereintahan Daerah Ideal* (Cetakan Pe). Intrans Publisihing.
- Rahmawati, T., Noor, I., & Wanusmawatie, I. (2014). SINERGITAS STAKEHOLDERS DALAM INOVASI DAERAH (Studi pada Program Seminggu di Kota Probolinggo (SEMIPRO)). *Jap*, 2(4), 641–647.
- Raja Abumanshur Matriddi, Shahril Budiman, Ferizone, F., Faizal Rianto, Setyadiharja, R., & Didi Kurniadi. (2021). *Penerapan Inovasi Daerah di Kabupaten Bintan*. *Indonesian Governance Journal: Kajian Politik-Pemerintahan*, 4(1), 42–54. <https://doi.org/10.24905/igj.v4i1.1822>
- Rogers, E. M. (2003). *Diffusion of Innovations Fifth Edition*. Free Press.
- Sani, I. (2022). *Manajemen Inovasi Smart City*.
- Schuh, G., Lau, F., & Herding, J. (2017). Description Model for Goals of Corporate Incubators. *ISPIM Conference Proceedings, December*, 1–18. <https://www.proquest.com/conference-papers-proceedings/description-model-goals-corporate-incubators/docview/2179559311/se-2?accountid=17242>
- Schuurman, D., Baccarne, B., Marez, L. De, & Mechant, P. (2012). Smart Ideas for Smart Cities: Investigating Crowdsourcing for Generating and Selecting Ideas for ICT Innovation in a City Context. *Journal of Theoretical and Applied Electronic Commerce Research*, 7(3), 49–62.
- Simamora, H. (2004). *Manajemen Sumber Daya Manusia* (Ed 3 Cet 1). STIE YPKN.
- Steen, K., & van Bueren, E. (2017). The Defining Characteristics of Urban Living Labs. *Technology Innovation Management Review*, 7(7), 21–33. <https://doi.org/10.22215/timreview1088>
- Stroeva, O. A., Sibirskaya, E. V, Khokhlova, O. A., & Oveshnikova, L. V. (2014). [Regionalization of the innovation management process](#). *Life Science Journal*, 14(02), 144–150.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian dan Pengembangan (Research and Development/R&D)*. Alfabeta Bandung.
- Suparno. (2017). [Inovasi Daerah Untuk Meningkatkan Iklim Investasi](#). *Mimbar Administrasi*, 1, 1–14.

- Sururi, A. (2017). [Inovasi Kebijakan dalam Perspektif Administrasi Publik Menuju Terwujudnya Good Public Policy Governance](#). *Spirit Publik: Jurnal Administrasi Publik*, 12(2), 14. <https://doi.org/10.20961/sp.v12i2.16236>
- Sutarno. (2012). *Serba-Serbi Manajemen Bisnis*. Graha Ilmu.
- Sutrisno, M. R. D. S., Zuhar, S., & Said, A. (2014). Inovasi Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. *Jurnal Administrasi Publik*, 3(11), 1814–1820. <http://administrasipublik.studentjournal.ub.ac.id/index.php/jap/article/viewFile/1050/406>
- Suwarno, Y. (2008). [Inovasi di Sektor Publik](#). *STIA-LAN Press, October*, 169.
- Syamsuddin, R., & Fuady, M. I. N. (2020). Upaya Penguatan Badan Penelitian dan Pengembangan serta Inovasi Daerah di Kota Palopo. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 4(1), 63. <https://doi.org/10.25072/jwy.v4i1.326>
- Tahir, M. M., & Harakan, D. A. (2017). [Prosiding Seminar Nasional Prodi Ilmu Pemerintahan Fisip Unikom Inovasi Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Program Smart Card Di Kota Makassar](#). 278–299.
- Tedjo, P. (2017). [Di Era Baru Pembangunan Otonomi Daeah](#). *Mimbar Administrasi*, 1(1), 41–49.
- UNESCAP. (2007). Good Governance. *UNESCAP (Online)*, Januari.
- University, C., INSEAD, & WIPO. (2020). [Global Innovation Index 2020: Creating Healthy Lives-The Future of Medical Innovation](#). Geneva: World Intellectual Property Organization (WIPO).
- Utomo, T. W. W. (2017). [Inovasi Harga Mati Sebuah Pengantar Inovasi Administrasi Negara](#) (Cetakan Ke). PT Raja Garafindo Persada.
- Wahyudi, A. (2016). Inovasi: Tantangan dan Menilai Kelayakannya. *Jurnal Borneo Administrator*, 12(2), 108.
- Walravens, N. (2012). Mobile business and the smart city: Developing a business model framework to include public design parameters for mobile city services. *Journal of Theoretical and Applied Electronic Commerce Research*, 7(3), 121–135. <https://doi.org/10.4067/S0718-18762012000300011>
- Wicaksono, K. W. (2019). TIPOLOGI INOVASI SEKTOR PUBLIK PADA TIGA PROGRAM INOVATIF PEMERINTAH DAERAH KOTA SURABAYA (Tinjauan Reflektif terhadap Tiga Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2018). *Jurnal Manajemen Pelayanan Publik*, 1(2), 196. <https://doi.org/10.24198/jmpp.v1i2.19895>

- Yaározatulo Harefa, H. (2021). [Analisis Inovasi Perencanaan Sebagai Strategi Tata Kelola yang Baik di Berbagai Provinsi](https://doi.org/10.52000/jsi.v1i1.3). *Jurnal Studi Inovasi*, 1(1), 16–21. <https://doi.org/10.52000/jsi.v1i1.3>
- Yin, R. K. (2014). *Studi Kasus: Desain dan Metode* (T. oleh M. D. Mudzakir (Ed.)). PT Raja Garafindo Persada.
- Yin, R. K. (2018). [Case study research and applications: Design and methods](https://doi.org/10.1177/109634809702100108). In *Journal of Hospitality & Tourism Research* (Vol. 53, Issue 5). <https://doi.org/10.1177/109634809702100108>
- Yufriawati. (2006). [Pembinaan Kota : Studi Kasus Pertumbuhan dan Perkembangan Kota Bekasi](#).